

Dana Tetap Hilang setelah DAK Keluar

Bagaimana kelanjutan penyelidikan polisi terkait kasus hilangnya dana pemkot?



SEBANYAK 11 wartawan dari berbagai media baik cetak maupun elektronik mendatangi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kantor regional 4 Jawa Tengah dan DIY, di gedung BI kanwil Jateng-DIY, Senin (23/3).

Mereka datang untuk menanyakan kelanjutan kasus hilangnya dana milik Pemkot Semarang senilai Rp 22 miliar di BTPN.

Kedatangan wartawan disambut Deputy Direktur Perijinan, Informasi, dan Dokumentasi OJK wilayah Jawa Tengah – DI Yogyakarta, Dian Danarsito. Sedangkan Kepala OJK Regional 4 Wilayah Jateng dan DIY Y Santoso Wibowo berhalangan hadir.

Dana Tetap...

DARI HALAMAN 1

Menurut penjelasan Dian, sejak DAK memutuskan berhenti sebagai karyawan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) pertengahan Januari 2011, saldo Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang yang berada di BTPN masih tersisa 17 miliar.

OJK mencatat, meski DAK sudah tidak bekerja lagi di BTPN, grafik saldo dana pemkot di BTPN terus turun hingga menysikan tiga bilyet dengan total saldo Rp 514 juta pada Januari tahun 2013.

Dian menjelaskan awalnya Pemkot Semarang melalui memorandum of understanding (MoU) dengan Bank BTPN menempatkan dana kas daerah senilai Rp 45 miliar pada 2007.

Semula dana itu disimpan dalam rekening giro, kemudian dipecah menjadi beberapa lembar deposito dengan nominal masing-masing Rp 10 miliar, Rp 5 miliar, Rp 2 miliar dan Rp 1 miliar dalam jangka waktu 1 bulan. Realisasi total outstanding

terbesar terlihat pada 2009 senilai Rp 57 miliar.

Sejak pertama kali dimasukkannya hingga sampai akhirnya DAK memutuskan keluar menjadi karyawan BTPN, saldo Pemkot Semarang tercatat pindah ke berbagai bank mencapai Rp 40 miliar, dan menysikan saldo sebesar Rp 17 miliar.

Bahkan setelah DAK berhenti sebagai karyawan BTPN, dana itu terus mengalir keluar ke berbagai bank atas nama Pemkot Semarang, mencapai sekitar 16,5 miliar dan hanya menysikan 514 juta dalam tiga bilyet. Namun, Dian tidak menyebutkan secara rinci transfer ke bank lainnya.

OJK wilayah Jawa Tengah-DI Yogyakarta belum dimintai kerjasama oleh aparat kepolisian untuk penanganan kasus dana pemkot Semarang senilai Rp 22 miliar yang hilang di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN).

"Polisi belum berkoordinasi dengan kami OJK. Mungkin

nanti ada saatnya akan kerjasama untuk mendalami secara lebih rinci, tapi sampai sekarang belum," kata Dian.

Dian menambahkan, pihaknya siap jika sewaktu-waktu polisi membutuhkan tenaga bantuan dari OJK. "Kami hanya menunggu penanganan dari kepolisian karena sudah ke ranah hukum," katanya.

OJK masih terus menelusuri rekam jejak dugaan raibnya uang Pemkot Semarang senilai Rp 22,7 miliar. OJK juga telah memanggil pihak BTPN Semarang untuk mengklarifikasi laporan hilangnya uang tersebut.

Menurut Dian, meski kasus sudah masuk ke ranah hukum, OJK akan tetap memonitor perkembangan permasalahan. Apabila BTPN melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi administratif atau lainnya.

"Tergantung pelanggaran-pelanggarannya, mulai dari teguran, atau kewajiban membayar. Karena saat ini kasus sudah masuk ranah hukum harus menunggu keputusan hukum tetap," katanya, Senin (23/3). **(wan)**